



GKBRAA Paku Alam Terima Tanda Jasa Bakti Koperasi dan UKM Tahun 2024

YOGYA (KR) - GKBRAA Paku Alam menerima Penghargaan Tanda Jasa Bakti Koperasi dan Usaha Kecil Menengah (UKM) Tahun 2024 untuk Kategori Tokoh Masyarakat, dari Kementerian Koperasi dan UKM. Tanda Jasa Bakti disematkan oleh Menteri Koperasi dan UKM Teten Masduki kepada Gusti Putri, sapaan akrab GKBRAA Paku Alam, pada malam Puncak Hari UMKM Nasional 2024 di Jakabaring Sport City, Palembang, Kamis (5/9) malam.

Tanda jasa tersebut merupakan penghargaan tertinggi yang diberikan Menkop UKM kepada Gusti Putri karena kiprahnya dalam pengembangan koperasi dan UKM di DIY. Penghargaan tersebut juga mengukuhkan keberhasilan dan peran aktif Gusti Putri sebagai

Wakil Ketua Dekranasda DIY dalam pengembangan koperasi dan UKM.

"UMKM memiliki peran penting dalam perekonomian nasional. Selain menjadi kekuatan ekonomi nasional, UMKM merupakan penyedia lapangan kerja terbesar di Indonesia. Kita harus terus mendorong dan mendukung UMKM untuk selalu bertransformasi dan berinovasi. Dengan begitu pada 2045, apa yang dicita-citakan Indonesia yaitu menjadi negara berpendapatan tinggi dapat terwujud," kata Gusti Putri.

GKBRAA Paku Alam merupakan pengali dan pembaharu motif batik yang mengalihwahanakan naskah kuno ke dalam wujud torehan motif batik yang kemudian disebut sebagai batik naskah.

* Bersambung hal 7 kol 1



GKBRAA Paku Alam menerima penghargaan Tanda Jasa Bakti Koperasi dan UKM Tahun 2024 dari Menteri Koperasi dan UKM Teten Masduki.

Libatkan Warga Bantul Polda DIY Bakar 3 Hektare Ladang Ganja



Dua karung ganja diperlihatkan saat jumpa pers di Mapolda DIY, Jumat (6/9/2024).

SLEMAN (KR) - Ditresnarkoba Polda DIY berhasil mengamankan 18 orang tersangka kasus penyalahgunaan narkoba, kurun waktu bulan Agustus 2024. Di antaranya merupakan dua tersangka yang tergabung dalam sindikat narkoba jaringan Yogya - Medan - Aceh.

Dari kedua tersangka berinisial MTH (39) yang tinggal di Kasihan Bantul dan MF (27) warga Medan itu, polisi menyita dua karung ganja

berat sekitar 50 kilogram. "Selain menyita dua karung ganja, kami juga telah memusnahkan ladang ganja seluas kurang lebih 3 hektare berisi 2.500 batang ganja di Aceh," ungkap Wadiresnarkoba Polda DIY AKBP Muharomah Fajarini di Mapolda, Jumat (6/9).

Terungkapnya kasus itu, diawali penangkapan terhadap tersangka MTH di Kasihan Bantul, dengan bukti ganja 153,17 gram. Ternyata,

MTH sebelumnya memesan secara online melalui akun instagram dari MF. Untuk mengelabui petugas, paketan itu dialamatkan di daerah Kebumen melalui jasa ekspedisi. Penangkapan selanjutnya dilakukan terhadap MF di Medan, yang kemudian mengaku mendapatkan ganja dari Gayo Lues, Aceh. Petugas bergerak ke lokasi untuk menemukan ladang ganja dimaksud oleh MF.

* Bersambung hal 7 kol 5

Analisis 'Bau' dan Entrepreneurship

Rustiana SE MSi PhD

KATA ibau' sekarang lagi ramai di medsos, terutama setelah ada cuitan dari seorang influencer terhadap salah satu keluarga pejabat publik. Membaca judul pada tulisan ini, kata 'bau' dan entrepreneurship seolah tidak nyambung. Apa hubungannya sehingga kata bau disandingkan dengan kata entrepreneurship. Korelasi dua kata ini terkesan dipaksakan karena mengikuti apa yang sedang viral di masyarakat.

Tidak bisa dipungkiri bahwa apapun itu entah kata, kalimat, perilaku dan hal-hal lain yang berhubungan dengan pejabat publik yang sedang viral di masyarakat menjadi isu yang hangat dibicarakan. Terlepas hal benar atau tidak namanya isu 'bau' terkait dengan kondisi sebenarnya, tulisan ini tidak hendak menyoroit soal bau dan relasinya terkait perpolitikan terkini. Namun tulisan ini difokuskan pada peluang usaha terkait mengelola 'bau' yang masih sangat besar untuk dikembangkan sebagai seorang entrepreneur dengan menggunakan jurus kreatifitas dan inovasi.

* Bersambung hal 7 kol 1

JADWAL SALAT	Zuhur	Asar	Magrib	Isya	Subuh
	11:40	14:57	17:40	18:49	04:21

Sabtu, 7 September 2024 Sumber: Kementerian Agama Kanwil Provinsi DIY

BILA KOTAK KOSONG MENANG Opsi KPU Pilkada Ulang di 2025

JAKARTA (KR) - Komisi Pemilihan Umum (KPU) RI membuka opsi untuk menggelar pilkada ulang pada akhir 2025 apabila banyak wilayah dengan peserta calon tunggal dimenangkan kotak kosong dalam Pilkada 2024. Kendati demikian, opsi tersebut tetap bergantung dari hasil rapat dengar pendapat (RDP) bersama Komisi II DPR RI dan pemerintah.

"Kalau secara prinsip, kebutuhan KPU menyiapkan tahapan pilkada itu teoritis 9 bulan. Arahnya mungkin tidak akan jauh beda, kemungkinan masih tetap menjelang akhir tahun 2025. Itu opsi ya," kata anggota KPU August Mellaz saat ditemui media di Kantor KPU RI, Jakarta, Jumat (6/9).

Adapun KPU dijadwalkan menghadiri RDP untuk membahas fenomena



KR-Antara/Akbar Nugroho Gumay

August Mellaz

kotak kosong Pilkada Serentak 2024 pada 10 September 2024. Sementara saat disinggung terkait keberlanjutan Pilkada Serentak 2029 bila dilakukan pilkada ulang pada tahun depan, Mellaz menjelaskan, saat ini instrumen undang-undangnya masih pemilu serentak.

"Kalau sekarang 27 November sepanjang undang-undangnya tidak berubah, artinya kita menghitung lagi kan sampai masa ja-

batan berakhir dan kemudian dilakukan pilkada. Itu reguler saja, kecuali ada kebijakan yang mengubahnya," ujarnya.

Ia tak menutup kemungkinan instrumen yang tersedia dapat memunculkan tafsir berbeda. Oleh karena itu, tafsir tersebut harus ditegaskan menjadi satu tafsir saja. "Apakah mengikuti siklus masa jabatan, sehingga nanti daerah-daerah yang kemudian kotak kosong yang menang itu kemudian diisi penjabat (Pj)?," jelas Mellaz.

Sebelumnya, Rabu (4/9), Ketua KPU RI Mochamad Afifuddin mengatakan, pertimbangan KPU melakukan pilkada ulang adalah supaya keberlanjutan pilkada mendatang tetap bisa serentak dan tidak diselingi dengan pelantikan Pj di sela kepemimpinan lima tahun kepala daerah.

* Bersambung hal 7 kol 5

SOAL PENUNDAAN PENETAPAN HAKIM AGUNG KY: Bisa Ganggu Jalannya Negara

JAKARTA (KR) - Anggota Komisi Yudisial (KY) Mukti Fajar Nur Dewata mengatakan, jika usulan calon hakim agung terus ditunda dan tidak segera ditetapkan sebagai hakim agung bisa mengganggu jalannya negara. Kebutuhan calon hakim agung, khususnya di kamar Tata Usaha Negara (TUN) khusus pajak, sangat mendesak karena jumlah perkara yang masuk cukup banyak, sementara hanya ada satu orang hakim agung Kamar TUN di Mahkamah Agung (MA) yang memiliki spesifikasi keahlian di bidang pajak.

"Itu bisa dibayangkan kalau macet, kalau (perkara) tidak diputus, berarti tidak ada yang kalah, tidak ada yang menang. Nanti pemerintah tidak dapat pembayaran pajak, kalau semua yang disengketakan berhenti di sengketa. Akan mengganggu jalannya negara ini," ucap Mukti saat ditemui usai konferensi pers di Kantor KY RI Jakarta, Jumat (6/9).

Seperti diketahui, pada Jumat (12/7), KY mengumumkan sembilan nama yang lolos seleksi calon hakim agung dan tiga nama calon hakim ad hoc HAM. Kemudian nama-nama tersebut diserahkan ke DPR RI untuk dilakukan uji kelayakan dan kepatutan (fit and proper test). Namun, Komisi III DPR RI pada Rabu (28/8), sepakat tidak menyetujui 12 nama yang direkomendasikan KY.

Fraksi-fraksi di parlemen menyatakan ada kesalahan mekanisme seleksi karena KY meloloskan calon yang tidak memenuhi syarat. Menindaklanjuti hal tersebut, KY mengirim surat keterangan tambahan ke Komisi III DPR RI. Surat yang ditandatangani Ketua KY Amzulian Rifai pada Rabu (4/9) itu menjelaskan alasan di balik diskresi yang dilakukan dalam seleksi calon hakim agung.

* Bersambung hal 7 kol 5

UANG RAMPASAN RAFAEL ALUN KPK Setor ke Negara Rp 40,5 M

JAKARTA (KR) - Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) telah menyetorkan ke kas negara uang sejumlah Rp 40,5 miliar. Uang tersebut hasil rampasan dari terpidana korupsi mantan pejabat Direktorat Jenderal Pajak Kementerian Keuangan Rafael Alun Trisambodo dalam kasus gratifikasi dan tindak pidana pencucian uang (TPPU).

"KPK telah berhasil mengeksekusi perkara korupsi Rafael Alun Trisambodo senilai Rp 40,5 miliar yang mencakup uang pengganti Rp 10,07 miliar, uang rampasan perkara gratifikasi dan TPPU Rp 29,9 miliar, serta uang rampasan perkara TPPU sebesar Rp 577 juta," kata Juru Bicara KPK Tessa Mahardhika di Gedung Merah Putih KPK, Jakarta, Jumat (6/9).

KPK menegaskan, tujuan akhir dari pemberantasan korupsi dalam memulihkan kerugian keuangan negara. Sehingga penyitaan terhadap aset-aset bernilai ekonomis yang berasal dari hasil tindak pidana korupsi juga dilakukan dalam rangka memberikan efek jera kepada para pelaku tindak pidana korupsi.

Sebelumnya, Pengadilan Tinggi DKI Jakarta di tingkat banding memutuskan, Rafael Alun Trisambodo tetap divonis 14 tahun penjara dan denda sebesar Rp 500 juta subsider tiga bulan penjara. Selain itu, Rafael Alun juga tetap dihukum membayar uang pengganti sebesar Rp 10.079.095.519,00, subsider tiga tahun penjara.

* Bersambung hal 7 kol 5

DEWAS BERIKAN SANKSI SEDANG Nurul Ghufron Langgar Kode Etik KPK



Wakil Ketua KPK Nurul Ghufron (kedua kanan) bersiap menjalani sidang etik pembacaan putusan di Gedung ACLC KPK, Jakarta.

Gedung Pusat Edukasi Antikorupsi KPK Jakarta Selatan, Jumat (6/9).

Dewas KPK kemudian

menyatakan memberikan sanksi sedang kepada Nurul Ghufron. Sanksi berupa teguran tertulis dan pemoto-

ngan penghasilan sebesar 20 persen selama enam bulan. Dewas KPK menyatakan hal yang memberatkan

Nurul Ghufron adalah tidak mendukung upaya pemerintah menghilangkan

* Bersambung hal 7 kol 1

SUNGGUH SUNGGUH TERJADI

● SENIN 26 Agustus 2024 malam, saat rumah mati listrik, tiba-tiba ada gempa. Semua anggota keluarga langsung berlarian keluar rumah. Selang beberapa menit kemudian, listrik menyala. Ponakan saya langsung nylethuk, "Ini namanya habis gempa terbitnya listrik." (Herumawan Prasetyo Adhie, Jalan Wonosari Km 9 Sribit Kidul RT 01 RW 11 Sendangtirto, Berbah Sleman 55573)-f